

KAJIAN
INVENTARISASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KOTA YOGYAKARTA
DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN..... 4

- A. Latar Belakang..... 4
- B. Identifikasi Masalah 8
- C. Tujuan dan Kegunaan..... 8
- D. Metode Penelitian 9

BAB III

KAJIAN TEORITIS 19

- A. Teori Pembagian Kewenangan 19
- B. Teori Perundang-Undangan..... 23

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 29

- A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 29
- B. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN..... 44
- C. DINAS KESEHATAN 49
- D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 56
- E. DINAS PERHUBUNGAN..... 62
- F. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA 71
- G. DINAS PERDAGANGAN 77
- H. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI..... 88
- I. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 92
- J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 97
- K. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 98
- L. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG..... 111
- M. DINAS PARIWISATA 113
- N. BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA 116
- O. BAGIAN ORGANISASI..... 118
- P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL..... 122
- Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 126

R. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	128
T. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	133
U. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKAN DAN PERSANDIAN	136
V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	140
W. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	141
X. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	144
Y. DINAS PERINDUSTRIAN.....	146
BAB IV	
PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan	149
B. Rekomendasi.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN I	169
LAMPIRAN II	170
LAMPIRAN III.....	184
LAMPIRAN IV	246

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan inventarisasi dan evaluasi Produk Hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kota Yogyakarta, penting untuk dilakukan, setidaknya dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) pertimbangan baik dari segi praktis, teoritis maupun yuridis.

Pertama, secara praktis, inventarisasi dan evaluasi Produk Hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 diperlukan untuk melihat status keberlakuan Produk Hukum Kota Yogyakarta Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Delegasi (Perintah Langsung) maupun Peraturan Walikota Petunjuk Pelaksanaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Artinya dengan dilakukannya kajian ini, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mana saja yang masih berlaku/masih sesuai, perlu dibentuk atau diintegrasikan, perlu dilakukan penyesuaian, atau bahkan perlu dicabut. Sehingga, hasil analisis terhadap status keberlakuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota di Kota Yogyakarta tersebut, dapat menghindari tumpang tindih antar produk hukum di Kota Yogyakarta. Faktor ini nantinya mempengaruhi pembentukan suatu sistem hukum yang baik.

Kedua, secara teoritis, masih berkaitan dengan pembentukan sistem hukum yang baik, Lon L. Fuller, sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, memberikan beberapa indikator agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau biasa disebut *principles of legality*. Setidaknya terdapat 8 (delapan) prinsip, salah satunya yakni suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain

(*free of contradictions*).¹ Lebih jauh lagi, bahwa peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogate legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.²

Tata hukum Indonesia juga menganut asas demikian, asas tersebut kemudian diperas dan di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara lebih jauh, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Untuk mencegah terjadinya pertentangan hukum, yang secara lebih kronis menyebabkan kegagalan sistem hukum, maka diperlukan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Terdapat dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. *Kedua*,

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 51-52. Secara lebih lengkap, teori *principles of legality*, yaitu *The rules must be (1) sufficiently general, (2) publicly promulgated, (3) prospective (i.e., applicable only to future behavior, not past), (4) at least minimally clear and intelligible, (5) free of contradictions, (6) relatively constant, so that they don't continuously change from day to day, (7) possible to obey, and (8) administered in a way that does not wildly diverge from their obvious or apparent meaning* dalam Lon Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, hlm. 33-38.

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 92-94.

³ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sinkronisasi horisontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.⁴

Ketiga, secara normatif, terdapat dinamika pembentukan atau perubahan beberapa peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang membawa akibat hukum besar terhadap produk hukum yang ada di Kota Yogyakarta. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah 77 Undang-Undang yang terbagi menjadi 11 klaster yang telah dibentuk peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut.⁵

- 1) Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 Peraturan Pemerintah.
- 2) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Badan Usaha Milik Desa: 4 Peraturan Pemerintah.
- 3) Investasi: 5 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden.
- 4) Ketenagakerjaan: 4 Peraturan Pemerintah.
- 5) Fasilitas Fiskal: 3 Peraturan Pemerintah
- 6) Penataan Ruang: 3 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden.
- 7) Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 Peraturan Pemerintah.
- 8) Lingkungan Hidup: 1 Peraturan Pemerintah.
- 9) Konstruksi dan Perumahan: 5 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden.
- 10) Kawasan Ekonomi: 2 Peraturan Pemerintah.
- 11) Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Peraturan Presiden.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 85.

⁵ Diakses dari <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/311/berita-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja> pada 1 Maret 2022.

telah mencabut beberapa Undang-Undang yang menjadi landasan utama bagi Daerah dalam melakukan penyelenggaraan pendapatan dan keuangan daerah di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁶

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan yang berkaitan dengan materi muatan dalam dua undang-undang tersebut yang berlaku di daerah secara mutatis mutandis juga ikut berubah. Artinya, apabila terjadi perubahan dan tidak dilakukan penyesuaian, maka akan terdapat potensi terjadinya pertentangan antara produk hukum Daerah Kota Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya akan bertentangan dengan dua undang-undang tersebut.

Selain dua undang-undang tersebut, kajian ini juga melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, kajian ini tidak menutup kemungkinan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dianalisis dengan Undang-Undang yang terkait apakah masih berlaku/masih sesuai, perlu dibentuk atau diintegrasikan, perlu dilakukan penyesuaian, atau bahkan perlu dicabut.

⁶ Ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan kajian inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Kajian ini sangat urgen untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Kota Yogyakarta dengan peraturan di atasnya, sehingga terbentuk tertib hukum dan terwujud sistem hukum yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inventarisasi dan evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Delegasi (Perintah Langsung) maupun Peraturan Walikota Petunjuk Pelaksanaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021?
2. Bagaimana rekomendasi terhadap produk produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang Terkait yang lebih tinggi?
3. Bagaimana langkah perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan rekomendasi pada Kajian Produk Hukum Kota Yogyakarta Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Delegasi (Perintah Langsung) maupun Peraturan Walikota Petunjuk Pelaksanaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;

2. evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021; dan
3. rekomendasi kategorisasi terhadap produk produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang Terkait.

Adapun kegunaan penulisan evaluasi ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyusun tindak lanjut atas produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan evaluasi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku atau yang akan dibentuk.⁷ Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilakukan wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Bahan Hukum

⁷ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan kajian evaluasi ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder,⁸ yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 22) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- 35) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang tersebut. Selain itu bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta antara lain:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 4) Dinas Pertanian dan Pangan
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Perhubungan
- 8) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
- 9) Dinas Perdagangan
- 10) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- 13) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

- 14) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
- 15) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- 16) Dinas Pariwisata.
- 17) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 18) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
- 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 20) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 21) Bagian Perekonomian dan Kerjasama
- 22) Bagian Organisasi.
- 23) Bagian Hukum
- 24) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 25) Perusahaan Daerah Air Minum
- 26) Perangkat Daerah Terkait lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan pe rundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, *website* resmi, serta melalui hasil wawancara di dalam *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan perangkat daerah yang dijadwalkan sebagai berikut.

No	OPD	Perda	Perwal	FGD Minggu ke-
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	17	51	Minggu ke-1 4 OPD: 29 Perda dan 72 Perwal
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	2	4	
3.	Dinas Kesehatan	5	7	

4.	Dinas Lingkungan Hidup	5	7		
5.	Dinas Perhubungan	6	12	Minggu ke-2 7 OPD: 23 Perda dan 27 Perwal	
6.	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	8	2		
7.	Dinas Perdagangan	4	7		
8.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	1	2		
9.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan	2	3		
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	1	1		
11.	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	1			
12.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.	9	23		Minggu ke-3 7 OPD: 18 Perda dan 33 Perwal
13.	Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1			
14.	Dinas Pariwisata	2	4		
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2		
16.	Bagian Organisasi	2	1		
17.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	1	2		
18.	Perusahaan Daerah Air Minum	1	1		
19.	Dinas Pemberdayaan	3	1	Minggu ke-4	

	Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)			7 OPD: 10 Perda dan 9 Perwal
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	5	
21.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.	1		
22.	Bagian Hukum	1	1	
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	
24.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1		
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1		
	TOTAL	80	138	

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. *Kesatu*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang tersebut. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. *Kedua*, pendekatan konseptual yakni menyusun rekomendasi atas evaluasi produk hukum Kota

Yogyakarta yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang tersebut.⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang, serta produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak, dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil *focus group discussion* dengan *stakeholders* Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. *Kedua*, data yang berkaitan dengan evaluasi produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang, yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rekomendasi atas produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang yang terkait di luar dua Undang-Undang tersebut.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰ Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

¹⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 14-16.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Pembagian Kewenangan

Pembagian tugas dan kewenangan akan menjadi penting agar terorganisirnya suatu kelompok atau negara. Negara yang turut serta secara aktif dalam masyarakat, maka kewenangan pemerintah semakin banyak dan semakin luas. Pembagian kewenangan kiranya juga menjadi penting karena bersamaan dengan lembaga-lembaga dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, "*Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".¹¹ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.¹²

Menurut Logemann, "Negara sebagai suatu organisasi pergaulan hidup, dengan kewibawaannya mempunyai tujuan mengatur dan memelihara pergaulan hidup tertentu". Sedangkan Mc Iver

¹¹ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke-15*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 100.

mengemukakan bahwa, “Negara merupakan sistem pengatur dan pengawas. Negara mengatur hubungan antarmanusia didalam hidupnya. didalam kehidupan sosial itu selalu dilakukan pengawasan terhadap tingkah laku berupa bantuan atau perlawanan, mempersatukan atau membebaskan serta pemeliharaan atau menghilangkan yang kurang baik.” untuk mencapai tujuan tersebut maka negara sebagai organisasi yang besar tentu harus melakukan pembagian tugas dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem pengatur dan pengawas. Dengan mengadakan pembagian tugas dan petugas sebagai alat-alat pelengkapan negara, masing-masing petugas melaksanakan tugasnya sesuai ruang lingkungannya dan kerjasama yang berkaitan satu sama lain.

Ada dua segi pembagian tugas yang perlu dilakukan supaya ada keseimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai bagiannya. *Pertama*, pembagian horizontal. Petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan yang sama dengan petugas lain yang ruang lingkup tugasnya berbeda. Dan tugas-tugas itu dilakukan oleh setiap petugas yang keseluruhan pekerjaan para petugas dalam kedudukan yang sama itu merupakan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya saja kedudukan menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pendidikan dan kebudayaan, dan sebagainya.

Kedua, pembagian vertikal. Tugas yang diserahkan kepada setiap petugas dalam pembagian horizontal. Walaupun hanya sebagian dari keseluruhan, dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga petugas lebih dari seorang. Orang-orang yang diperlukan itu akan bekerja dibawah tanggung jawab seseorang, sedangkan tugasnya hanya sebagian kecil dari bagian tugas. Para petugas itu tidak bekerja secara sejajar, melainkan bertingkat atau dalam hierarkhi. Maka, berarti pembagian tugas tersebut menurun atau bertingkat (vertikal). Misalnya saja menteri dalam negeri kepada para gubernur, para gubernur kepada kepada para bupati/walikota madya di masing-masing provinsinya dan seterusnya dari atas ke bawah. Begitupun sebaliknya dari bawah ke

atas yang masing-masing mengerjakan bagian kecil untuk keseluruhan bagian dari menteri dalam negeri itu.

Dalam pembagian tugas tersebut, bagi sebuah negara yang memiliki wilayah luas umumnya akan dipecah lagi menjadi beberapa wilayah pemerintahan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Disinilah kemudian dikenal istilah “pemerintahan pusat” dan “pemerintahan daerah”. Pemerintah pusat dipimpin oleh pimpinan/kepala negara, sedangkan “pemerintah daerah” akan dipimpin oleh pimpinan daerah seperti gubernur atau bupati/walikota. Tugas pemerintahan daerah dikerjakan atas pemberian tugas atau perintah dari pemerintahan pusat. Dalam pembagian tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagai suatu sistem pemerintahan. Hal itu kaitannya dengan pertanggungjawaban petugas dalam melaksanakan tugasnya.

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹³

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribusi bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara memperoleh kewenangan:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgeven ann een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian

¹³ *Ibid*, hlm.70.

wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain).

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam pelaksanaannya, menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul *On Civil Government* tahun 1690 dan Montesquieu pada *De l'esprit de lois* pada tahun 1748 melihat bahwa penyelenggaraan negara, terutama di Inggris ialah bahwa tugas negara itu dapat dikelaompokkan dalam tiga kelompok kegiatan. Pendapat ini kemudian oleh Immanuel Kant diistilahkan dengan "Trias Politica". Ketiga pembagian ini tugas yang dilakukan atas kekuasaan perundang-undangan (legislatif), kekuasaan penyelenggraan (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Secara lebih mendalam ia juga mengatakan bahwa kekuasaan yang muncul berasal dari para individu dan antara kekuasaan satu dengan lainnya harus sama. Artinya tidak ada satu kekuasaan yang lebih kuat dari yang lain, sehingga benar-benar dapat menentukan keseimbangan kekuasaan antar ketiganya atau *balance of power*. Pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan menggunakan prinsip saling mengawasi atau *check and balance*.

B. Teori Perundang-Undangan

Teori peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari khasanah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan yaitu, ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), kajiannya berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif (*handhungsorientiert*).¹⁴ Lain daripada itu, teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), lebih berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*), dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).¹⁵

Secara teoritis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi sekaligus konsekuensi dari negara yang menganut prinsip negara hukum. Lebih spesifik dan tegasnya, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sejatinya merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁶ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentunya harus taat pada kaidah-kaidah yang berlaku, termasuk juga berbagai teori yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, memahami landasan teoritis serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting.

¹⁴Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT. Kanisius (Anggota IKAPI), 2007, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai pengertian yang jamak.¹⁷

- a. *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang,¹⁸
- b. *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undangan, dan keseluruhan daripada undang-undang negara,¹⁹
- c. *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.²⁰

Artinya, perundang-undangan dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas (proses), atau juga sebuah produk (hasil). Sehingga, khusus pembahasan mengenai ilmu di bidang perundang-undang mencakup proses pembentukan atau perbuatan membentuk peraturan negara, dan sekaligus mengenai segala peraturan negara hasil dari proses pembentukan tersebut, baik di Pemerintah Pusat maupun di Daerah.²¹

Menurut Bagir Manan terdapat beberapa hal yang dapat mendefinisikan peraturan perundang-undangan:²²

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut

¹⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan...*, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁸ Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S, *Ibid.*

¹⁹ S. Wojowasito, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S, *Ibid.*

²⁰ Adolf Heiken, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S, *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

dengan wet in materiele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.

Selain itu, Jhon Michael Otto juga pernah mengemukakan bahwa, terdapat jurang yang lebar antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya.²³ Artinya, apa yang termaktub dalam norma peraturan perundang-undangan, justru sering tidak mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu Michael Otto memberikan parameter untuk mengukur hal ini, yaitu semakin baik sistem hukum berfungsi dalam suatu negara, maka akan semakin tinggi tingkat kepastian hukum terwujud dalam kehidupan nyata.²⁴ Teori ini mengajarkan kepada para penyelenggara negara, agar membangun sistem hukum yang baik. Sistem hukum yang baik akan terwujud apabila antar komponen sub-sistem berjalan secara beriringan dan saling mendukung. Sub-sistem hukum dimaksud biasanya merujuk pada perincian sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System: A Social Science Perspective*”, bahwa hukum sebagai sebuah sistem mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:

- a. Tidak berlaku surut;
- b. Tidak dapat diganggu gugat;
- c. *Welvarstaat*;
- d. *Lex superiori derogate lex inferiori*;

²³ *Ibid.*, hlm. 42-43.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lihat Lawrance M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1969, hlm. 16-18.

- e. *Lex specialis derogate lex generalis*; dan
- f. *Lex posteriori derogate lex priori*;

Pembangunan dan pembaharuan hukum pada suatu negara sejatinya tidak cukup hanya dengan melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundang-undangan yang sekadar fokus pada komponen substansi. Namun, sebaiknya juga mempertimbangkan sekaligus membenahi struktur organisasi yang ada dalam sistem hukum nasional, serta memperhatikan kondisi dan interpretasi kultural para insan pencari keadilan.²⁶ Meski demikian, bukan berarti aktivitas untuk melakukan evaluasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan menjadi tidak penting. Hanya saja, dalam aktivitas tersebut kiranya juga perlu memperhatikan komponen struktur dan kultur hukum masyarakat dimana peraturan tersebut berlaku.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan efektif apabila memiliki dasar keberlakuan. Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik mengkualifikasikan dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan menjadi 6 (enam) aspek, antara lain:²⁷

- a. keberlakuan filosofis.
- b. keberlakuan yuridis.
- c. keberlakuan sosiologis.
- d. keberlakuan ekologis.
- e. keberlakuan ekonomis.
- f. keberlakuan kultural.

Masing-masing dasar keberlakuan tersebut mengurai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif sesuai cita-cita atau tujuan negara, tidak saling bertentangan antar satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain,

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, Op. Cit., hlm. 49-50.

²⁷ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Yogyakarta, Total Media, 2011, hlm. 28-34.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mewujudkan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup, mendukung aktivitas perekonomian, dan sesuai dengan budaya bangsa. Berikut beberapa aspek identifikasi yang relatif mudah untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah dikatakan masih memiliki daya keberlakuan.²⁸

Sejalan dengan perkembangan di dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan juga perlu mengikuti bagaimana seharusnya menyeimbangi masyarakat tersebut. Hal ini berkaitan dengan substansi pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat beberapa hal mempengaruhi perubahan peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai perubahan substansi pada suatu peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila melihat Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07. merupakan kegiatan analisis yang berarti “penyeledikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”, di samping itu evaluasi memiliki arti penilaian atau memberikan penilaian. Sehingga, pengertian evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan penilaian menggunakan beberapa variable dan indikator antara lain:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

²⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Tolak Ukur, Indikator, dan Parameter Kesalahan Perda*, sebagaimana dikuti kembali oleh Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting: Seri..., Ibid.*, hlm. 124-126.

- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kajian ini akan menginventarisasi dan mengevaluasi Produk Hukum Kota Yogyakarta Tahun 2010-2021. Pada inventarisasi dan evaluasi produk hukum ini terhadap 25 Perangkat Daerah, Berikut analisis Produk Hukum pada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b.

Ketiga, secara substansial, secara kewenangan, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berwenang dalam menarik pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah. Selain itu, terdapat penyesuaian objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang tersebut. Sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta bahwa tarif dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan masih relevan dan sesuai.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Walikota ini perlu disesuaikan apabila Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan perubahan,

selain itu, dari segi konsep dan prosedur, perlu penambahan ketentuan tentang pembayaran secara *online*.

2. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b.

Ketiga, secara substansial, secara kewenangan, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berwenang dalam menarik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah. Selain itu, sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, terdapat penyesuaian penghitungan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut. Juga terdapat perubahan penghitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang tersebut.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu, sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

c. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara formiil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah berkaitan dengan Pajak juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b.

Ketiga, secara substansial, secara kewenangan, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berwenang dalam menarik beberapa pajak yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini. Pasal 2 tersebut menyebutkan sebagai berikut. “*Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; dan h. Pajak Sarang Burung Walet.*”

Terhadap beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut, terdapat perubahan yang signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah. Perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah. Pasal 4 ayat (2) ini mengatur tentang Jenis Pajak apa saja yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT); Pajak reklame; Pajak Air Tanah; Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak sarang burung wallet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; Opsen BBNKB.

Selaras dengan aturan di atas, sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan yakni terkait perubahan konsep atau prosedur dan perubahan definisi atau istilah dari pajak-pajak seperti hotel, restoran,hiburan digabungkan menjadi satu ke dalam Pajak Barang dan Jasa

tertentu. Terdapat penambahan jenis opsen Pajak, dan perluasan objek pajak parker dan pajak reklame.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu, sehingga perlu dilakukan perubahan yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

- d. *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak*
 - i. Evaluasi
 - (1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara formil

pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terlebih Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, akan tidak berlaku lagi. Sehingga, Peraturan Daerah ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b.

Ketiga, secara substansial, secara kewenangan, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berwenang mengatur jenis-jenis pajak yang dikenai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak. Namun, terjadi perubahan konsep atau prosedur dan perubahan definisi atau istilah dari pajak-pajak seperti hotel, restoran, hiburan digabungkan menjadi satu ke dalam Pajak Barang dan Jasa tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Terdapat peraturan walikota yang juga terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu, sehingga perlu dilakukan perubahan yakni: Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak.
2. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

e. *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas: a. keadilan; b. kepatutan; c. manfaat untuk masyarakat; dan d. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, bahwa Peraturan Daerah ini masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak perlu dilakukan perubahan.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan Peraturan Walikota yang berkaitan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dari segi Peraturan Walikota pun juga tidak ada yang perlu ditindak lanjuti.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk karena menyesuaikan ketentuan dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. pejabat pengelola BMD; b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; n. BMD berupa Rumah Negara; dan o. ganti rugi dan sanksi.

Sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, bahwa Peraturan Daerah ini masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Peraturan Walikota yang saat ini berlaku masih merujuk pada Peraturan Daerah yang lama, terpisah-pisah dan masih belum terintegrasi, Peraturan Walikota tersebut yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain Dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.
3. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.

Sebagaimana keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, bahwa amanat pembentukan Peraturan Walikota dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih dalam proses pembentukan. Sehingga sangat mendesak untuk segera dibentuk dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, masih merujuk pada Peraturan Walikota yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah yang lama dan masih belum terintegrasi, yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain Dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.
3. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.

Sehingga Peraturan Walikota delegasi dari Peraturan Daerah ini, sangat mendesak untuk segera dibentuk dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
2. Sedangkan untuk Peraturan Walikota yakni
 - a. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
 - b. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh

Pihak Lain Dan Pemakaian Barang Milik Daerah
Oleh Masyarakat.

- c. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.

Disebabkan Peraturan Walikota tersebut masih merujuk pada Peraturan Daerah yang lama dan masih belum terintegrasi, maka perlu segera dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan. Sehingga masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

B. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- a. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha*

(Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan)

- i. Evaluasi
 - (1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya berkaitan tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah,

disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, secara substansial, Peraturan Daerah ini masih relevan hanya berganti sedikit berkaitan dengan definisi atau istilah yakni yang sebelumnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah menjadi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Sedangkan Retribusi Rumah Potong Hewan juga sedikit berubah menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak. Perubahan di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan relevansi dengan kondisi Kota Yogyakarta, sesuai dengan keterangan Dinas Pertanian dan Pangan bahwa Peraturan Daerah ini yang mengatur berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha khususnya berkaitan tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan masih relevan hanya saja, Retribusi Produksi Usaha Daerah kaitannya dengan objek retribusi olahan pangan sudah tidak ada karena lebih fokus ke pelayanan dan pelatihan. Pada retribusi penjualan bibit terdapat perubahan standarisasi harga, penyesuaian keadaan di lapangan. Ke depan perlu juga mengatur mengenai pembayaran secara elektronik dan perlu penyesuaian terkait pengawasan. Hal ini berkaitan dengan indikator perubahan kewenangan dan indikator perubahan prosedur/konsep.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. 2. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang berkaitan dengan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu: 1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. 2. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya berkaitan tentang Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, secara secara substansial, Peraturan Daerah ini masih relevan hanya berganti sedikit berkaitan dengan definisi atau istilah yakni yang sebelumnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Perubahan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya yang mengatur Retribusi Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan dan 1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah tersebut telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep definisi/istilah, dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk

hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

C. DINAS KESEHATAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formiil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b.

Ketiga, secara substansial, Peraturan Daerah ini juga memenuhi indikator perubahan kewenangan dan perubahan prosedur/konsep. Bahwa Perda ini salah satunya mengatur berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a. Kemudian, secara lebih lengkap ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan diatur pada

BAB IV tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari pasal 4 sampai dengan pasal 14. Secara umum, ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Perda ini, yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan sudah tidak diterapkan, kecuali retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan hewan. Hal ini disebabkan kegiatan retribusi pelayanan kesehatan sudah dipindahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 156 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Yogyakarta. Sehingga Peraturan Daerah ini mengalami perubahan secara kewenangan disebabkan yang sebelumnya Dinas Kesehatan dipindahkan ke Puskesmas. Terdapat perubahan konsep/prosedur karena dikoordinasikan oleh Puskesmas.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan antara lain, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum* Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut. Peraturan

Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan maka dua produk hukum Kota Yogyakarta tersebut telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari aspek kewenangan, Peraturan Daerah ini masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara untuk melaksanakan jaminan kesehatan di daerah. Ketentuan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kedua, dari aspek prosedur/konsep, Peraturan Daerah ini pernah dikaji oleh internal Dinas Kesehatan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKP DIY). Kesimpulan dari kajian tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Penyelenggara yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22. Badan Penyelenggara ini yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah tetapi justru akan kontraproduktif karena ada resiko hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, resiko gagal bayar dan resiko lain.

Ketiga, dari aspek definisi dan istilah jaminan kesehatan per daerah sudah tidak diakui, tetapi diselenggarakan secara nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai dari aspek kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi atau istilah.

(2) Peraturan Walikota

Sedangkan untuk beberapa Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, yakni: 1. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; 2. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga menurut Dinas Kesehatan masih berlaku dan relevan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah ini, telah memenuhi indikator kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi atau istilah. Sehingga penyesuaian pada Peraturan Daerah ini masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan untuk 1. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; 2. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah masih berlaku dan relevan sehingga masuk dalam kategori tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

1. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
2. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;

3. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
4. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, di antaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sebagaimana keterangan dari Dinas Kesehatan, bahwa Peraturan Daerah ini masih relevan diberlakukan di Kota Yogyakarta.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu: Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Walikota ini juga masih berlaku dan relevan dengan keadaan Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka dua produk hukum Kota Yogyakarta tersebut yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih berlaku dan relevan disebabkan tidak adanya perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi atau istilah, sehingga

masuk dalam kategori rekomendasi tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

a. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. Peraturan Daerah ini relatif masih baru karena dibentuk pada tahun 2021. Tujuan Peraturan Daerah ini yakni:

1. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
2. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
3. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
4. memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
5. membentuk budaya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya di antaranya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana keterangan dari Dinasi Kesehatan, bahwa Peraturan Daerah ini masih berlaku dan relevan dengan keadaan Kota Yogyakarta karena masih relatif baru dibentuk, sehingga tidak perlu perubahan perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi atau istilah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular mengamankan beberapa Peraturan Walikota, tetapi sampai kajian ini dilakukan belum ada yang diterbitkan. Sebagaimana keterangan Dinas Kesehatan, bahwa pembentukan peraturan walikota masih dalam proses, yakni perpanjangan peraturan walikota tentang rencana aksi daerah tentang tuberkolosis. Sehingga, perlu segera dibentuk delegasi Peraturan Walikota khususnya berkaitan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular karena terdapat delegasi Peraturan Walikota dan perlu menyesuaikan dengan materi muatan dalam Peraturan Daerah ini,

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular mengamankan beberapa Peraturan Walikota, tetapi sampai kajian ini dilakukan belum ada yang diterbitkan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular masuk kategorisasi rekomendasi tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Peraturan Walikota delegasi Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini belum dibentuk. Sehingga, masuk kategorisasi rekomendasi Sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum khususnya berkaitan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, secara substansial, Peraturan Daerah ini masih relevan hanya berganti sedikit berkaitan dengan definisi atau istilah yakni yang sebelumnya Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan menjadi Retribusi Pelayanan Kebersihan. Perubahan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yakni karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut. 1.Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. 2.Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. 3.Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan beberapa Peraturan Walikota:

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian.

3. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perubahan pengaturan terhadap materi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkup pemerintahan daerah. Izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. *Pertama*, perubahan kewenangan dalam memberikan dan menilai dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) yang dahulu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi berwenang, tetapi melewati Tim Uji Kelayakan Lingkungan.

Kedua, perubahan prosedur/konsep, pelaku usaha dapat melakukan proses persetujuan lingkungan yang sudah diintegrasikan dalam perizinan berusaha. Perizinan Berusaha tersebut melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Konsep yang lama menguraikan bahwa izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha.

Ketiga, perubahan definisi/istilah, di antaranya sebagai berikut. Dari perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Dari Izin Pembuangan Limbah Cair menjadi persetujuan teknis Limbah B3 dan Limbah Cair.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa produk hukum Kota Yogyakarta yang terdampak. *Pertama*, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan. *Ketiga*, Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3. *Keempat*, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. Tiga Perwalikota di atas, rencananya akan dicabut dengan membentuk 1 Perwalikota karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa Peraturan Walikota: 1. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan. 2. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3. 3. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi/istilah. Sehingga

penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

4. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah. Terdapat beberapa aspek yang terpenuhi dalam evaluasi Peraturan Daerah ini yakni. *Pertama*, dari aspek delegasi waktu. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Hal ini berarti bahwa, semenjak 2 tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ditetapkan yakni pada tahun 2010, maka Kota Yogyakarta harus segera membentuk Peraturan Daerah dengan minimal materi muatan yang disyaratkan dalam Pasal 44 ayat (2).

Kedua, dari segi kewenangan dan prosedur/konsep, dan definisi atau istilah. bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah paling sedikit memuat: a. pengurangan dan penanganan; b. lembaga pengelola; c. hak dan kewajiban; d. perizinan; e. insentif dan disinsentif; f. kerjasama dan kemitraan; g. retribusi; h. pembiayaan dan kompensasi; i. peran masyarakat; j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; k. pengawasan dan pengendalian; dan l. larangan dan sanksi. Materi muatan tersebut harus diatur dalam

Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta. Padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, masih belum memenuhi semua materi muatan tersebut.

Sebagaimana keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, bahwa telah dilaksanakan penyusunan kajian atas naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di daerah Kota Yogyakarta. Saat ini penyusunan tersebut, sampai tahapan kajian oleh panitia khusus.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang juga terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yakni Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hingga saat ini peraturan walikota tersebut masih berlaku dan relevan

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu segera untuk disesuaikan karena memenuhi indikator kewenangan dan prosedur/konsep, definisi atau istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

E. DINAS PERHUBUNGAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, secara kewenangan dan definisi/istilah, sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memang tidak mengenal Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hanya mengenal Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Sampai saat ini, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah belum dibentuk, sehingga penjelasan mengenai Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Sehingga, Pemerintah Kota Yogyakarta, sambil menunggu peraturan pelaksana tersebut, dapat melakukan penafisan dengan memasukkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ke dalam kategori Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yakni karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu yakni Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sehingga, Peraturan Walikota ini perlu disesuaikan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu segera untuk disesuaikan karena memenuhi indikator kewenangan dan prosedur/konsep, definisi atau istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, secara kewenangan dan definisi/istilah, sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih tidak berubah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yakni karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep dan delegasi waktu yakni Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu segera untuk disesuaikan karena memenuhi indikator kewenangan dan prosedur/konsep, definisi atau istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

c. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formiil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Tempat Khusus Parkir juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, yakni definisi/istilah, sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat perubahan definisi/istilah yakni dari Retribusi Tempat Khusus Parkir menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yakni karena telah memenuhi

indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu yakni 1. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 2. Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 3. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
2. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Produk hukum tersebut, perlu segera untuk disesuaikan karena memenuhi indikator kewenangan dan prosedur/konsep, definisi

atau istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa dampak yang diberikan kepada Perda ini tetapi hanya terbatas, yakni perubahan definisi atau istilah, dari Angkutan Kota menjadi Angkutan perkotaan.

Sejatinya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga merubah berkaitan dengan konsep analisis Dampak Lalu Lintas. Sehingga berbeda dengan konsep sebelumnya. Tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur tentang konsep tersebut, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatur analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana keterangan dari Dinas Perhubungan langsung merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamantkan pembentukan peraturan walikota. Sampai saat ini, belum ada peraturan walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan Walikota yang dibentuk baru

mengatur antara lain tentang manajemen dan rekaya lalu lintas di beberapa titik jalan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya terdampak kecil atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni hanya terkait definisi/istilah. Sehingga Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan seara minor. Sehingga, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk kategori Tidak Mendesak, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.

Berkaitan dengan Peraturan Walikota, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga masuk dalamn kategori mendesak.

a. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Walikota

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi sebagaimana keterangan dari Dinas Perhubungan, bahwa Peraturan Daerah tersebut masih relevan dan tidak perlu ada perubahan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan dampak.

(2) Peraturan Walikota yang Terkait

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran yakni Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Peraturan Walikota ini masih relatif baru dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak diperlukan perubahan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, disebabkan tidak ada temuan. Kategori rekomendasi adalah tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

F. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi guna melakukan penyesuaian kelembagaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah sudah tidak dikenal lagi, dan digantikan dengan Perusahaan Umum Daerah. Oleh karenanya dengan peraturan daerah ini penamaan perusahaannya berubah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta menjadi Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta. Selanjutnya organ perusahaan, kepegawaian dan pengoperasian dan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta dan sekitarnya disesuaikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan juga dijiwai oleh adanya penguatan peran dan kelembagaan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam rangka memenuhi penguasaan hajat hidup orang banyak, yaitu air bersih dan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Sesuai dengan keterangan dari Bagian Perekonomian dan Kerjasama bahwa, Peraturan Daerah ini masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

(2) Peraturan Walikota yang

Terdapat beberapa Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta antara lain:

1. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.
3. Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM
4. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.

Beberapa peraturan walikota tersebut masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Terdapat beberapa peraturan walikota lain yang belum dibentuk, antara lain: kewenangan pemilik modal PDAM, tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Pengawas, pelayanan pelanggan,

restrukturisasi, dan pengawasan, Selain itu, Peraturan Walikota yang telah dibentuk di atas, masih terpisah-pisah dan belum diintegrasikan dalam satu peraturan walikota yang berbentuk peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Disebabkan tidak ada temuan, maka masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan peraturan walikota yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.
3. Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM.
4. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan walikota di atas, masih relevan, tidak ada temuan, maka juga masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk dan disesuaikan dalam peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka berdampak substansi materi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan.

Sesuai dengan keterangan dari Bagian Perekonomian dan Kerjasama bahwa, Peraturan Daerah ini masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

(2) Peraturan Walikota

Terdapat beberapa Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja antara lain:

1. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.

2. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.

Beberapa peraturan walikota tersebut masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Terdapat beberapa peraturan walikota lain yang belum dibentuk, antara lain: penyaluran kredit dan laporan dewan pengawas. Selain itu, Peraturan Walikota yang telah dibentuk di atas, masih terpisah-pisah dan belum diintegrasikan dalam satu peraturan walikota yang berbentuk peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Disebabkan tidak ada temuan, maka masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan peraturan walikota yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan walikota di atas, masih relevan, tidak ada temuan, maka juga masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk dan disesuaikan dalam peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang yakni sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan sebagai entitas bisnis sehingga ke depan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa diandalkan, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kelembagaan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda, yaitu menjadi PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda). Dengan perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan kinerja perusahaan semakin meningkat dan profesional dalam mengelola dan mendayagunakan aset daerah serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bersifat ekonomik dan sesuai dengan potensi Daerah.

Sesuai dengan keterangan dari Bagian Perekonomian dan Kerjasama bahwa, Peraturan Daerah ini masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

(2) Peraturan Walikota yang Terkait

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha memberikan amanat untuk membentuk Peraturan walikota. Tetapi sampai kajian ini dilakukan, belum ditemukan Peraturan Walikota amanat Peraturan Daerah ini, antara lain: Peraturan Walikota berkaitan dengan pelaksanaan penugasan kepada PT. Jogjatama Vishesha, pembinaan dan pengawasan. Maka, Perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk dan

disesuaikan dalam peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Disebabkan tidak ada temuan, maka masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan peraturan walikota perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk dan disesuaikan dalam peraturan walikota petunjuk teknis pelaksanaan. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

G. DINAS PERDAGANGAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Pasar juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, yakni definisi/istilah, sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa mungkin saja terdapat peleburan dalam retribusi pelayanan tera/tera ulang yang masuk dalam pelayanan pasar.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pelayanan Pasar, yakni karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu, sehingga perlu disesuaikan. Peraturan Walikota tersebut yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
2. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi

Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
2. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

b. *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan

prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, yakni dari kewenangan, sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa mungkin saja terdapat peleburan dalam retribusi pelayanan tera/tera ulang yang masuk dalam pelayanan pasar tetapi mungkin saja juga tidak, sehingga perlu menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Terdapat juga Surat dari Kementerian Perdagangan Nomor: 505/PTKN.4.1/SD/3/2022 tentang Tarif Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang, yang isinya sebagai berikut:

Berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan payung hukum penetapan Peraturan Daerah terkait retribusi jasa pelayanan tera dan/atau tera ulang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penarikan retribusi atas pelayanan tera dan/atau tera ulang yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Implementasi dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dapat berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, kami harapkan Saudara dapat mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait dan penyelenggaraan pelayanan tera dan/atau tera ulang tetap dapat berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait dengan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yakni karena telah memenuhi indikator perubahan kewenangan, prosedur/konsep dan delegasi waktu, sehingga perlu disesuaikan. Peraturan Walikota tersebut yakni:

1. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

- c. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Antara lain pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar*

muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (*antara lain pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir*) ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, secara substansial, Peraturan Daerah ini masih relevan hanya berganti sedikit berkaitan dengan definisi atau istilah yakni yang sebelumnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Perubahan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (*antara lain pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir*) karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Antara lain pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir).
2. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
4. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Penyelenggaraan tera/ tera ulang diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Secara umum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal masih berlaku. Undang-Undang tersebut kemudian diubah beberapa Pasal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu perubahan yakni dalam Pasal 13 Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sebelumnya, wewenang pengaturan tentang:

- a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; dan
- c. tempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.

Berada pada tangan Menteri, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, wewenang pengaturan tersebut berada pada pemerintah pusat.

Perubahan selanjutnya di dalam Pasal 17 Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang sebelumnya berbunyi: *“Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.”*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi berbunyi:

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perubahan juga terjadi di dalam Pasal 18 Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang sebelumnya berbunyi: *“Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.”* Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai Metrologi Legal terdapat dalam BAB IX Pasal 128 sampai dengan 137.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lama dan belum melakukan penyesuaian.

Berdasarkan kajian di atas, maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka memberikan dampak kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dari segi kewenangan dan prosedur atau konsep, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- (2) Peraturan Walikota

Sampai kajian ini dilakukan belum ada Peraturan Walikota yang dibentuk atas delegasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang. Padahal terdapat delegasi untuk membentuk Peraturan Walikota. Sehingga dengan demikian apabila dalam penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang masih tetap memberikan delegasi pembentukan Peraturan Walikota maka sangat mendesak untuk dibentuk.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan dari segi kewenangan dan konsep atau prosedur. Sehingga masuk kategori rekomendasi mendesak, perlu masuk daftar propempera. Sedangkan untuk Peraturan Walikota, apabila dalam penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang masih tetap memberikan delegasi pembentukan Peraturan Walikota maka sangat mendesak untuk dibentuk.

H. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, dari segi substansial, yakni dari segi istilah atau definisi terjadi perubahan. Yang sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menyebut dengan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka berubah menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing karena telah memenuhi

indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebagai berikut.
2. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Sebagaimana keterangan dari Dinas Sosial dan Komite Disabilitas, bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih berlaku dan masih relevan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena isi Peraturan Daerah ini sebagian besar mengadaptasi dari Undang-Undang tersebut. Muatan lokal dalam Peraturan Daerah juga masih cukup relevan dengan kondisi yang ada di Pemerintahan Kota Yogyakarta maupun dalam masyarakat terutama Penyandang Disabilitas. Relevansi tersebut bisa dilihat dari jenis dan ragam disabilitas yang tercantum, diakomodirnya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Bab VIII, juga terkait pembentukan Kecamatan Inklusi di Pasal 97 yang sangat penting sebagai upaya strategis menuju Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan pembentukan beberapa Peraturan Walikota. Sebagaimana keterangan dari Dinas Sosial dan Komite Disabilitas, bahwa beberapa perwal aturan pelaksanaan Perda sudah terbentuk dan sebagian belum terbentuk. Dikarenakan perwal tersebut diamanatkan kepada beberapa Perangkat Daerah sesuai tupoksi maka peran Sekretariat Daerah sangat diperlukan untuk mengkoordinir beberapa Perangkat Daerah tersebut. Sehingga Peraturan Walikota yang belum dibentuk sangat mendesak untuk dibentuk dalam satu Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

(2) Peraturan Walikota yang Terkait

Sebagaimana keterangan dari Dinas Sosial dan Komite Disabilitas, bahwa beberapa perwal aturan pelaksanaan Perda sudah terbentuk dan sebagian belum terbentuk. Dikarenakan perwal tersebut diamanatkan kepada beberapa Perangkat Daerah sesuai tupoksi maka peran Sekretariat Daerah sangat diperlukan untuk mengkoordinir beberapa Perangkat Daerah tersebut. Sehingga Peraturan Walikota yang belum dibentuk sangat mendesak untuk dibentuk dalam satu Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Disebabkan tidak ada temuan, maka masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Sedangkan peraturan walikota perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

I. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pemadam Kebakaran)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (*Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran dan Mobil Pemadam Kebakaran*) ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, secara substansial, Peraturan Daerah ini masih relevan hanya berganti sedikit berkaitan dengan definisi atau istilah yakni yang sebelumnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Perubahan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang juga terkait Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (*Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran dan Mobil Pemadam Kebakaran*) karena telah memenuhi indikator perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga perlu dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pemadam Kebakaran)
2. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan prosedur/konsep, definisi/istilah dan delegasi waktu. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, juga telah mengubah beberapa hal berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Salah satunya berkaitan dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Di dalam Peraturan Daerah mengatur bahwa pemilik/atau pengguna bangunan gedung baru wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung ketika gedung memiliki kriteria: ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang. Sedangkan sesuai dengan Pasal 220 ayat (5) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung diubah definisi/istilah menjadi manajemen proteksi kebakaran. Manajemen Proteksi Kebakaran ini merupakan unit manajemen kebakaran, organisasi proteksi kebakaran, tata laksana operasional, dan sumber daya manusia.

Dari segi kewenangan, terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor; 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran, yakni penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran hanya mempersyaratkan: berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m², atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai. Sedangkan sesuai dengan keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kota Yogyakarta juga akan menerapkan untuk selain 5 (lima) lantai juga akan diberikan penanggungjawab proteksi kebakaran.

Selain itu, dari sisi konsep dan prosedur, dalam Peraturan Daerah ini pemeriksaan masih belum mengakomodir pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang dilakukan secara *online*.

(2) Peraturan Walikota

Terdapat dua Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini yakni Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta. Beberapa Peraturan Walikota tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan kewenangan, definisi/istilah dan konsep atau prosedur. Selain itu dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta juga belum mengakomodir pengajuan secara *online*, sehingga perlu segera disesuaikan. Penyesuaian sangat mendesak untuk dilakukan dengan menyatukan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan. Penyesuaian sangat mendesak untuk dilakukan dengan menyatukan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
3. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta.

perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan kewenangan, prosedur/konsep, dan definisi/istilah. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini lahir setidaknya didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah ini sebagaimana keterangan dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Terdapat paling tidak 9 (Sembilan) amanat pembentukan Peraturan Walikota dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, tetapi hingga saat kajian dilakukan, Peraturan Walikota masih dalam proses. Sehingga pengesahan Peraturan Walikota yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah ini sangat mendesak untuk dilakukan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Disebabkan tidak ada temuan, maka masuk kategori rekomendasi tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Sedangkan peraturan walikota perlu dibentuk peraturan walikota yang belum dibentuk. Sehingga masuk kategori rekomendasi sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena temuan banyak dan dampak besar.

K. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.*

(Retribusi Pelayanan Kebersihan)

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dari indikator perubahan prosedur/konsep pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara formil pembentukan, seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak harus dibentuk dalam satu peraturan daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum khususnya berkaitan tentang Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah, disatukan dengan seluruh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Kedua, dari indikator delegasi waktu, bahwa seluruh peraturan daerah berkaitan dengan retribusi dan pajak juga memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga peraturan daerah ini pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, sejauh ini peraturan daerah ini masih relevan dan berlaku di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Sehingga, hanya beberapa hal saja yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan

Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Berkaitan dengan kedua peraturan walikota tersebut, nantinya juga perlu dilakukan penyesuaian setelah peraturan daerah yang baru dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair perlu segera untuk disesuaikan karena memenuhi indikator kewenangan dan prosedur/konsep, definisi atau istilah dan delegasi waktu. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

2. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Hingga saat ini peraturan daerah ini masih berlaku di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan belum mengalami perubahan. Adapun juga belum ada keperluan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Organisasi Pemerintahan Daerah yang berkaitan peraturan daerah ini juga masih relevan sehingga tidak perlu adanya perubahan.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan Walikota petunjuk pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh hingga saat ini belum dibentuk. Padahal, dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat delegasi peraturan walikota petunjuk pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Melihat dengan kondisi kebutuhan hukum pada peraturan daerah ini, maka perlu adanya pembentukan peraturan walikota petunjuk pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sehingga

penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun hingga saat ini masih relevan dan berlaku terhadap beberapa peraturan yang muncul di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, di sisi lain setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga merevisi Undang-Undang tentang Rumah Susun. Perubahan pada Undang-Undang tersebut saah satunya terkait dengan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selanjutnya, pembentukan BP3 ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun ini ada kemungkinan akan dilakukan perubahan apabila BP3 sudah resmi dan dibentuk dengan menyesuaikan dengan kebutuhan peraturan daerah.

(2) Peraturan Walikota

Delegasi peraturan walikota pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun antara lain yakni: *Pertama*, Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun. Peraturan walikota ini dimungkinkan akan memerlukan perubahan apabila Peraturan daerah juga mengalami perubahan.

Kedua, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta, saat ini peraturan walikota ini perlu perubahan karena menurut organisasi pemerintahan terkait terdapat kebutuhan hukum

mengenai pengelolaan rumah susun yang saat ini belum menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketiga, terdapat beberapa peraturan walikota tentang beberapa rumah susun di Kota Yogyakarta yakni Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan, Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan. Pada ketiga peraturan walikota saat ini masih berlaku dan relevan, akan tetapi ketiga peraturan walikota ini perlu adanya peintegrasian pada cukup satu peraturan walikota saja.

Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan walikota ini saat ini masih relevan dan tidak perlu adanya penyesuaian akan tetapi terdapat kebutuhan hukum terkait dengan pengaturan rumah susun yang belum menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Organisasi pemerintah daerah terkait dapat terus mengikuti secara berkala mengenai pembentukan BP3 agar dapat menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terjadi terkait dengan pengaturan mengenai rumah susun.

Adapun dengan beberapa peraturan walikota terkait Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan, Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan, pada ketiga peraturan walikota tersebut terdapat kebutuhan hukum pada peraturan walikota tentang Rumah Susun Terkait Tarif dan Pengelolaan dapat diintegrasikan pada satu peraturan walikota. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam

kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

c. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan terpenuhi dalam evaluasi Peraturan Daerah ini yakni. Berkaitan dengan nomenklatur izin dalam peraturan daerah ini pada Pasal 5, 6, dan 7 disebutkan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung nomenklaturnya menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Peraturan walikota ini perlu penyesuaian dengan beberapa nomenklatur terkait dengan penyebutan “Camat” menjadi “Mantri Pamong Praja”. Selain itu juga penyebutan “Dinas Penanaman Modal dan Perizinan seharusnya “Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Satu Pintu”. Sehingga beberapa nomenklatur tersebut perlu adanya penyesuaian.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan harus dilakukan penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung yang mana dalam ini juga menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

(2) Peraturan Walikota

Beberapa peraturan walikota yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 diantaranya yakni Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen Pada Kawasan Ketandan Yogyakarta. Ketiga peraturan walikota tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

ii. Rekomendasi

Organisasi pemerintah daerah yang berkaitan untuk segera menyesuaikan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan beberapa

peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, dan andal;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya;
- c. terwujudnya Bangunan Gedung yang berjatidiri dan produktif, layak huni, serta selaras dan serasi dengan lingkungannya; dan
- d. kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang baru di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah ini sudah relevan dan disesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga, hingga saat ini tidak perlu adanya perubahan yang dilakukan.

(2) Peraturan Walikota

Terdapat beberapa peraturan walikota terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. *Pertama*, Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Akibat hukum atas dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung maka peraturan walikota terbit juga perlu disesuaikan. Saat ini organisasi pemerintah daerah terkait sudah melakukan penyusunan draft peraturan walikota terbaru.

Kedua, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan walikota ini perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. *Ketiga*, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan walikota ini merupakan petunjuk pelaksana peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan peraturan daerah yang baru.

Keempat, Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan walikota ini masih berlaku, akan tetapi, kemungkinan dilakukan pencabutan apabila peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung yang saat ini sedang dalam proses pembentukan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung maka beberapa peraturan walikota yang berkaitan perlu menyesuaikan

dengan beberapa hal yang menjadi perubahan peraturan daerah tersebut. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang baru di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah ini sudah relevan dan disesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga, hingga saat ini tidak perlu adanya perubahan yang dilakukan.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Saat ini peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi belum memiliki peraturan walikota petunjuk pelaksanaan. Akan

tetapi, terdapat amanat atau delegasi peraturan walikota yang saat ini masih dalam proses pembentukan.

ii. Rekomendasi

Kebutuhan hukum yakni terkait dengan pembentukan peraturan walikota petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi. Sehingga, Organisasi pemerintah daerah terkait agar segera menetapkan peraturan walikota yang saat ini dalam penyusunan. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

3. Produk Hukum Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota dibentuk dengan tujuan:

- a. untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban serta menjamin akuntabilitas atas Penyelenggaraan Penerangan Kota; dan
- b. untuk menciptakan dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang baru di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah ini sudah relevan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, hingga saat ini tidak perlu adanya perubahan yang dilakukan

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan.

Saat ini Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota belum memiliki peraturan walikota petunjuk pelaksanaan. Akan tetapi, terdapat amanat atau delegasi peraturan walikota yang saat ini masih dalam proses penetapan.

ii. Rekomendasi

Kebutuhan hukum yakni terkait dengan pembentukan peraturan walikota petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota. Sehingga, Organisasi pemerintah daerah terkait agar segera menetapkan peraturan walikota yang saat ini dalam penyusunan.

b. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan limbah domestik memenuhi indikator evaluasi dari beberapa aspek. *Pertama*, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kedua, perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni berkaitan dengan perubahan nomenklatur persyaratan menjadi standar, serta penyederhanaan penataan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Saat ini Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan limbah domestik belum memiliki peraturan walikota petunjuk pelaksanaan. Akan tetapi, terdapat amanat atau delegasi peraturan walikota yang saat ini masih dalam proses penetapan. Adapun disamping itu apabila ada perubahan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka perlu dibentuk peraturan walikota petunjuk pelaksana peraturan daerah tersebut.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di diatas, maka organisasi pemerintah daerah terkait segera melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan segera membentuk peraturan walikota petunjuk pelaksana delegasi dari peraturan daerah tersebut. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

L. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini mengatur strategi dan pelaksanaan pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah saat ini masih relevan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sehingga, Peraturan Daerah ini tidak perlu adanya penyesuaian lagi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yakni Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Akan tetapi disamping itu masih ada beberapa delegasi peraturan walikota yang perlu dibentuk sebagai pemenuhan kebutuhan hukum terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yakni antara lain: Peraturan Walikota terkait dengan Pengenaan Insentif dan Pengenaan Disinsentif, Peraturan Walikota terkait dengan Pengolaan Cagar Budaya serta Rencana Induk Kawasan Cagar Budaya, Peraturan Walikota terkait mekanisme pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, Peraturan walikota terkait dengan rencana induk sistem drainase, peraturan walikota

Rencana dan Mekanisme Pengembangan Jalur Pedestrian, Peraturan walikota penempatan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa, dan peraturan walikota Rincian tentang pembangunan dan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum.

Beberapa muatan peraturan walikota tersebut saat ini belum disusun, sehingga terjadi kebutuhan hukum terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terintegrasi pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan peraturan daerah yang hingga saat ini tidak ada kebutuhan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja sehingga masih berlaku dan relevan.

Adapun di samping itu, Peraturan walikota yang berkaitan yakni Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 juga telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun, di samping itu perlu segera pembentukan peraturan walikota yang telah menjadi delegasi peraturan daerah tersebut. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

M. DINAS PARIWISATA

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Walikota

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan peraturan daerah yang belum merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi, penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah yang terkait pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Sehingga, beberapa hal terkait dengan keperluan perubahan-perubahan yang diperlukan dapat disesuaikan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Beberapa peraturan walikota yang berkaitan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yakni Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Pada beberapa peraturan walikota tersebut menurut organisasi pemerintah yang berkaitan saat ini masih relevan dan

berlaku. Sehingga, tidak perlu adanya perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, beberapa peraturan walikota ini masih terpisah-pisah sehingga perlu ada peintegrasian peraturan walikota dijadikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksanaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka beberapa peraturan walikota yang menjadi delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata segera diintegrasikan dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksanaan. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 saat ini dilingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta masih berlaku dan relevan. Akan tetapi, organisasi pemerintahan terkait akan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan terbit tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah tersebut yakni terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Saat ini Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 belum dibentuk mengenai

peraturan walikota petunjuk pelaksanaannya. Padahal dalam peraturan daerah tersebut terdapat amanat peraturan walikota.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka rekomendasi yang diberikan yakni. *Pertama*, organisasi pemerintah yang berkaitan dapat selalu mengikuti dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, sehingga apabila terjadi perubahan pengaturan terkait dengan mekanisme, teknis dan nomenklatur agar segera disesuaikan. Kedua, peraturan walikota petunjuk pelaksana untuk segera dibentuk agar terpenuhinya kebutuhan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

N. BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah merupakan peraturan daerah yang saat ini masih berlaku di pemerintahan Kota Yogyakarta. Namun, saat ini sedang dilakukannya perubahan dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kebijakan-kebijakan nasional. Sehingga, saat ini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yakni Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Peraturan walikota tersebut saat ini masih berlaku dan relevan. Akan tetapi, masih ada beberapa peraturan walikota amanat peraturan daerah tersebut yang perlu dibentuk.

Beberapa muatan peraturan walikota yang belum dibentuk hingga saat ini antara lain yang berkaitan dengan Daerah rawan bencana, Pedoman penyusunan dokumen Rencana penanggulangan bencana, Pendidikan formal terintegrasi, Mekanisme penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana, Kemudahan akses, Mekanisme mengenai sistem komando tanggap darurat bencana, Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana, Mekanisme koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha, Mekanisme mengenai rehabilitasi, Mekanisme mengenai rekonstruksi, Mekanisme pemberian bantuan akibat bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi, Mekanisme pengelolaan dana siap pakai, Mekanisme Pengelolaan sumber daya bantuan bencana, dan Tata cara pemberian dan besarnya bantuan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah perlu

segera dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dengan beberapa kebijakan nasional. Di samping itu peraturan walikota yang telah menjadi delegasi peraturan daerah tersebut untuk segera dibentuk dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksana yang terintegrasi dan memuat beberapa delegasi peraturan daerah tersebut. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

O. BAGIAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bertujuan:

- a. terwujudnya kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi yang baik di Daerah;
- c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal; dan
- d. terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Peraturan daerah ini saat ini masih berlaku dan akan dilakukan pengkajian kembali terkait dengan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terjadi perubahan pada, pertama, Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hingga saat ini peraturan walikota ini masih berlaku. Akan, tetapi karena adanya kebutuhan pembaharuan hukum pada peraturan daerah. Maka, peraturan walikota ini perlu dilakukan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka hal yang perlu ditinjau lanjuti yakni terkait dengan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta merupakan peraturan daerah yang hingga saat ini masih berlaku, akan tetapi beberapa muatan diubah ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta saat ini belum dibentuk. Padahal ada beberapa amanat delegasi peraturan walikota.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka organisasi pemerintah yang berkaitan segera membentuk peraturan walikota yang menjadi amanat atau delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta merupakan hasil Evaluasi dan Penataan kelembagaan Perangkat

Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta saat ini masih berlaku dan relevan di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta. Sehingga, sejauh ini belum perlu adanya penyesuaian atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta saat ini belum dibentuk, padahal terdapat beberapa amanat pendelegasian peraturan walikota antara lain: (1) mengenai susunan, kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah. (2) pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli (4) pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, organisasi pemerintah daerah yang berkaitan agar segera memenuhi kebutuhan hukum Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yakni dengan membentuk peraturan walikota yang telah didelegasikan oleh peraturan daerah tersebut. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan saat ini masih berlaku di pemerintahan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, beberapa pasal pada peraturan daerah ini telah disesuaikan dan diubah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan-perubahan yang terjadi yakni berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan, dan beberapa pasal dihapus.

Sehingga, apabila ada penyesuaian dengan Perubahan/Penggantian Perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat diubah melalui peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum ada, padahal terdapat kebutuhan hukum yakni untuk peraturan walikota petunjuk pelaksana dalam peraturan daerah tersebut.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, maka untuk peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan saat ini belum diperlukan perubahan atau penyesuaian karena sudah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan hukum maka perlu dibentuk peraturan walikota petunjuk pelaksana peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan peraturan daerah perubahan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebutuhan hukum. Hal ini bertujuan untuk

mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan saat ini masih berlaku dan relevan di pemerintahan Kota Yogyakarta dan belum memerlukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Perubahan/Penggantian Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum ada, padahal terdapat kebutuhan hukum yakni untuk peraturan walikota petunjuk pelaksana dalam peraturan daerah tersebut. Antara lain, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi, mekanisme pelaporan Penduduk yang pindah dalam Daerah, mekanisme pelaporan pindah ke luar Daerah bagi Orang Asing Tetap Terbatas dan Orang Asing Tetap, mekanisme pelaporan Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri, mekanisme pelaporan Penduduk WNI yang datang dari luar negeri, mekanisme pelaporan Orang Asing Tetap Terbatas yang datang dari luar negeri, mekanisme pelaporan Orang Asing Tetap Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tetap, dan mekanisme pelaporan Orang Asing Tetap Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tetap.

pelaporan Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri, pendataan penduduk non permanen, persyaratan, tata cara Pencatatan Kelahiran, dan mekanisme pelaporan kelahiran oleh penduduk, mekanisme pelaporan peristiwa kelahiran di luar negeri oleh Penduduk Daerah, mekanisme pelaporan peristiwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan oleh WNI atau orang asing, pelaporan penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, pelaporan pembatalan perkawinan yang sah oleh WNI, pelaporan perceraian, pelaporan pencatatan perceraian bagi penduduk WNI yang berada di luar negeri, pelaporan pembatalan perceraian, mekanisme pelaporan kematian, persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak, mekanisme pelaporan perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI, persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota, mekanisme pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK, persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el, persyaratan dan tata cara pemberian hak akses data dan dokumen kependudukan, dan persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk.

Beberapa substansi muatan peraturan walikota tersebut merupakan kebutuhan hukum yang segera dibentuk dalam peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum membutuhkan penyesuaian atau perubahan. Di samping itu, organisasi pemerintah yang

berkaitan dapat segera memebentuk peraturan walikota yang berkaitan dengan beberapa delegasi peraturan daerah tersebut dalam satu peraturan walikota yang terintergrasi. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan peraturan daerah yang dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
- b. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat;
- e. menjamin penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

- f. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. menjamin keselamatan aset Daerah; dan
- h. meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan hingga saat ini masih relevan dan berlaku di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga tidak diperlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yakni Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip di Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kearsipan Di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengamanatkan 20 muatan yang harus dibentuk peraturan walikota, akan tetapi masih beberapa peraturan walikota belum dibentuk dan/atau dalam proses pembentukan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan hingga saat ini masih berlaku dan relevan sehingga tidak perlu dilakukannya perubahan. Di samping itu, untuk beberapa peraturan walikota

yang telah menjadi amanat peraturan daerah dan belum dibentuk dapat segera dibentuk yang terintegrasi dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksana.

R. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan merupakan peraturan daerah yang sudah lama, padahal telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana juga berkonsekuensi pada Pendidikan Menengah yang ditarik menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Di samping itu, juga terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengenai OSS tentang perizinan penyelenggaraan sekolah.

Di samping itu, juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Daerah yang merupakan penyelenggara Standar Nasional Pendidikan harus terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, juga pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan.

Adapun organisasi pemerintah daerah yang berkaitan telah membahas perubahan peraturan daerah ini pada tahun 2019,

akan tetapi pengkajian tersebut tertunda untuk sekaligus menunggu Rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga beberapa substansi pada peraturan daerah ini perlu di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan hingga saat ini belum dibentuk, padahal ada beberapa hal yang perlu diatur dalam peraturan walikota yang sudah didelegasikan pada peraturan daerah ini. Antara lain: pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal, Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah, syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal, Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat, Bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan, Standar Pendidikan yang belum di atur dalam peraturan daerah, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk Standar Isi Daerah, Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran, Ketentuan teknis mengenai Standar Kompetensi Lulusan Daerah, Ketentuan teknis mengenai Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan daerah, Standar sarana dan prasarana daerah, Ketentuan teknis mengenai standar sarana dan prasarana Daerah, Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, Ketentuan teknis mengenai Standar Penilaian Pendidikan Daerah, Mekanisme pelaksanaan kerjasama, dan

Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan, tata cara pencabutan izin.

Beberapa muatan peraturan walikota tersebut seharusnya segera dibentuk dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka organisasi pemerintah yang berkaitan harus menempuh beberapa hal, antara lain, *pertama*, penyesuaian Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, menyusun peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan meintegrasikan beberapa muatan peraturan walikota yang telah di delegasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana.

b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan peraturan daerah yang saat ini masih berlaku dan relevan. Sehingga, saat tidak diperlukan penyesuaian dan perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hingga saat ini belum dibentuk. Padahal, beberapa amanat peraturan walikota antara lain, kerjasama Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan, pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, tata cara pengembalian bantuan pendanaan, pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu, obyek yang memperoleh fasilitasi dan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, pengembangan sentra pembinaan olahraga disabilitas, dan pemberian penghargaan.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka organisasi pemerintah daerah yang terkait dapat segera melakukan penyusunan

peraturan walikota Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

S. BAGIAN HUKUM

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan peraturan daerah

yang saat ini masih relevan dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yakni Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Saat ini peraturan walikota ini masih berlaku dan relevan dengan peraturan daerah delegasinya. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hingga saat ini masih berlaku dan relevan. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

T. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah. Hingga saat ini peraturan daerah ini masih relevan dan berlaku hingga saat ini. Akan tetapi, menurut organisasi pemerintahan daerah yang berkaitan apabila akan ada dilakukan perubahan salah satunya penambahan mengenai peran serta masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Hingga saat ini peraturan walikota ini masih relevan dan berlaku di pemerintahan Kota Yogyakarta.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum mempunyai kebutuhan hukum untuk diubah atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disusun agar ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Perlindungan terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dapat diwujudkan apabila Peraturan Daerah yang telah dibuat dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berlangsung secara damai atau tidak ada konflik, tetapi dapat pula yang sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, maka aturan hukum tersebut harus ditegakkan.

Adapun hingga saat ini, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih berlaku dan relevan. Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota yang Berkaitan

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yakni Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan walikota ini nantinya akan diubah karena kebutuhan hukum yang mana sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil. Akan tetapi, peraturan walikota ini masih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Meskipun beberapa muatan pada peraturan walikota ini perlu diubah, tetapi peraturan walikota ini masih bisa dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka untuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum mempunyai kebutuhan hukum untuk perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun di samping itu, pembentukan peraturan walikota terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk segera dilakukan. Hal ini dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi permasalahan dan dampak dari peraturan daerah. Sehingga, nantinya peraturan walikota dapat terintergrasi dalam satu peraturan walikota petunjuk pelaksana.

U. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKAN DAN PERSANDIAN

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

- a. *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.*

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang relatif baru yang mana diperbarui dengan menyesuaikan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi hingga saat ini belum diterbitkan namun sudah dalam proses pembentukan. Padahal terdapat 13 amanat peraturan walikota yang didelegasikan. Antara lain yakni, penyalarsan Infrstruktur Pasif dengan tematik wilayah, kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif, penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif, persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan

Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan, kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur; teknis pelaksanaan pendirian Menara; teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell*; tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik; teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*); tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif; dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Beberapa amanat peraturan walikota tersebut sudah seharusnya segera untuk dibentuk dan diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka organisasi pemerintah yang berkaitan segera menyelesaikan peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memuat 13 muatan peraturan walikota tersebut dan diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan Pelayanan Publik pemerintah daerah;
- c. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK;
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
- e. mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK; dan
- f. meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang relatif baru yang mana diperbarui dengan menyesuaikan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi hingga saat ini belum dibentuk, namun terdapat beberapa amanat peraturan walikota, antara lain: sistem Keamanan Informasi; Standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; mekanisme berbagi pakai Data; Pembangunan dan/atau pengembangan TIK; i sistem Keamanan Informasi; dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

iii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka organisasi pemerintah yang berkaitan segera menyelesaikan peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Peraturan Walikota yang berkaitan dengan yang memuat 6 muatan peraturan walikota tersebut dan

diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 merupakan peraturan daerah yang memuat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir berlakunya peraturan daerah ini, sehingga telah dibentuk Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Hingga saat ini belum ada peraturan walikota yang dibentuk. Akan tetapi melihat tengang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada peraturan daerah ini berakhir pada tahun 2022 dan sudah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 maka sudah tidak menjadi kebutuhan hukum peraturan daerah ini membuat peraturan walikota.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka kebutuhan hukum baik penyesuaian atau perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan pembentukan peraturan walikota yang berkaitan tidak menjadi urgensi yang mendesak.

**W. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta
Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan
Yang Lebih Tinggi**

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak merupakan peraturamm daerah yang dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi

masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;

- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi SKPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak saat ini masih berlaku dan relevan. Adapun peraturan daerah ini juga masih sesuai apabila disandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yakni Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023. Akan tetapi, masih ada beberapa peraturan walikota delegasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang hingga saat ini belum dibentuk. Sehingga, hal ini merupakan kebutuhan hukum terkait dengan belum adanya peraturan walikota petunjuk pelaksana yang meintegrasikan semua muatan amanat peraturan walikota di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

iii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak hingga saat ini belum memerlukan penyesuaian atau perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu keperluan peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak dapat segera dibentuk dengan meintegrasikan semua muatan amanat peraturan walikota.

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan peraturamm daerah yang dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Saat ini masih berlaku. Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

hingga saat ini masih belum dibentuk. Akan tetapi ada beberapa amanat/delegasi peraturan walikota yang perlu segera dibentuk, antara lain: indikator Ketahanan Keluarga; pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga; kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan; dan istem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka oraganisasi pemerintah yang berkaitan segera menyelesaikan peraturan walikota petunjuk pelaksana. Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, beberapa muatan peraturan walikota tersebut dan diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana. Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

X. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Perubahan/Penggantian Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan merupakan peraturan daerah yang disusun dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyedian dan pemberian hak-hak keuangan berupa penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang

kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian hak-hak keuangan digunakan untuk menunjang kegiatan dan kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan hingga saat ini masih relevan dan berlaku. Sehingga, saat ini belum ada kebutuhan perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan hingga saat ini belum dibentuk. Akan tetapi, terdapat beberapa amanat peraturan walikota yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan. Antara lain yakni: penetapan kemampuan keuangan daerah dan besaran penghitungan; standar satuan harga pakaian dinas dan atribut; besaran tunjangan perumahan; besaran tunjangan transportasi; standar kebutuhan minimal rumah tangga; standar satuan harga perjalanan dinas DPRD; kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

Beberapa muatan peraturan walikota tersebut harus diubah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan pengaturan. Berkaitan dengan Peraturan walikota hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD saat ini sudah dalam proses, akan tetapi materi peraturan walikota disisipkan dalam materi rancangan peraturan walikota yang mengatur tentang keuangan. Sehingga, beberapa muatan peraturan walikota yang belum dibentuk dapat segera

dibentuk dalam satu peraturan walikota yang terintegrasi.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan gingga saat ini masih relevan dan berlaku. Sehingga tidak perlu adanya penyesuaian atau perubahan yang perlu dilakukan. Berkaitan dengan peraturan walikota yang belum dan sudah memiliki kebutuhan hukum maka dapat segera dibentuk dalam satu peraturan walikota yang terintegrasi.

Y. DINAS PERINDUSTRIAN

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Terdampak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

i. Evaluasi

(1) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan peraturan daerah yang dibentuk dengan tujuan dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha yang berkembang, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan. Hingga saat ini peraturan daerah ini masih berlaku. Akan tetapi, dalam peraturan daerah ini belum mencakup mengenai ketentuan Koperasi. Bahkan hingga saat ini di Kota Yogyakarta belum ada ketentuan mengenai Koperasi.

Adapun permasalahan diatas tersebut dalam memenuhi kebutuhan hukumnya perlu adanya koordinasi dengan Komisi DPRD dalam menindaklanjuti peraturan daerah ini. Sehingga nantinya ketentuan mengenai koperasi di pemerintahan Kota Yogyakarta tidak mengalami kekosongan hukum.

(2) Peraturan Walikota

Peraturan walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hingga saat ini masih belum dibentuk. Hal ini salah satunya karena belum lamanya peraturan daerah ini belum diterbitkan. Adapun beberapa amanat peraturan walikota yang terdapat pada peraturan daerah ini yakni insentif; perlindungan aspek pemasaran, toko modern wajib menampung produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan menyediakan ruang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Mekanisme dan besaran penyediaan embiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan; Penentuan dan ketentuan lebih lanjut tentang Kompetensi Inti Daerah; penyelenggaraan Program Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; nsentif dengan keringanan pajak dan/atau retribusi; dan Tata cara pemberian sanksi.

Beberapa muatan peraturan walikota tersebut perlu segera diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

ii. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka oraganisasi pemerintah yang berkaitan segera menyelesaikan peraturan walikota petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Walikota yang berkaitan dengan beberapa muatan peraturan walikota tersebut dan diintegrasikan pada satu peraturan walikota petunjuk pelaksana.

Sehingga penyesuaian produk hukum tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II, maka kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Terdapat 55 Peraturan Daerah, 65 Peraturan Walikota, dan 36 Peraturan Walikota hasil delegasi dari Peraturan Daerah yang dilakukan inventarisasi Produk Hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut dilakukan dengan pendekatan tiga klaster, yakni:
 - a. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - c. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdampak Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kajian inventarisasi dan evaluasi Produk Hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 juga telah melibatkan 25 perangkat daerah di Kota Yogyakarta. Pelibatan 25 perangkat daerah tersebut untuk memperoleh informasi tentang keberlakuan dan masukan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dievaluasi.

2. Kajian evaluasi terhadap 55 Peraturan Daerah, 65 Peraturan Walikota, dan 36 Peraturan Walikota hasil delegasi dari Peraturan Daerah menghasilkan beberapa kategorisasi rekomendasi terhadap status keberlakuan hukum untuk dilakukan pencabutan/perubahan/pembentukan yang baru sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah:
 - i. Terdapat 23 Peraturan Daerah yang masuk kategori **Sangat mendesak**. Sehingga perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
 - ii. Terdapat 1 Peraturan Daerah yang masuk kategori **Mendesak**. Sehingga, perlu masuk daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - iii. Terdapat 1 Peraturan Daerah yang masuk kategori **Tidak Mendesak**. Sehingga, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
 - iv. Terdapat 30 Peraturan Daerah yang masuk kategori **Tidak Perlu Ditindaklanjuti**.
- b. Peraturan Walikota:
 - i. Terdapat 36 Peraturan Walikota dan 27 delegasi Peraturan Walikota dari Peraturan Daerah yang belum dibentuk atau belum lengkap. Dua jenis Peraturan Walikota tersebut masuk kategori **Sangat mendesak**. Sehingga perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
 - ii. Terdapat 7 Peraturan Walikota yang masuk kategori **Mendesak**. Sehingga, perlu masuk daftar Peraturan Walikota yang harus disusun.
 - iii. Terdapat 14 Peraturan Walikota yang masuk kategori **Tidak Mendesak**. Sehingga, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
 - iv. Terdapat 8 Peraturan Walikota yang masuk kategori **Tidak Perlu Ditindaklanjuti**.

B. Rekomendasi

Hasil rekomendasi inventarisasi dan evaluasi Produk Hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021

diperlukan untuk melihat status keberlakuan Produk Hukum Kota Yogyakarta Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Delegasi (Perintah Langsung) maupun Peraturan Walikota Petunjuk Pelaksanaan disusun dalam kategorisasi sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak.

Mendesak

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Tidak Mendesak

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Tidak Ada yang Perlu ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota.
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi.
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

2. Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

A. Peraturan Walikota yang sudah ditetapkan Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi.

1. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
 6. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
 7. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
 8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
 9. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
 10. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
 11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
 12. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
 13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.

14. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
16. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan.
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta.
18. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
19. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
21. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen Pada Kawasan Ketandan Yogyakarta.

22. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
23. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
24. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
25. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
26. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
27. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
28. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
29. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
30. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

31. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.
32. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
33. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
34. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
35. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.
36. Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

B. Delegasi Peraturan Daerah yang belum dibentuk atau belum lengkap.

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
3. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
7. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
8. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
9. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
11. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.
12. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
13. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
14. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hingga saat ini belum dibentuk.
15. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
16. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
17. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
18. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
20. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
21. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
22. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
23. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.
24. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota
25. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.
26. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
27. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong
4. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun

2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021.

5. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
6. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
7. Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Tidak Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan.
3. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun.
5. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip di Kota Yogyakarta.
6. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kearsipan Di Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah.
9. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.

10. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
11. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
12. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
13. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.
14. Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM.

Tidak ada yang perlu ditinjaulanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
3. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.
5. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

6. Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
7. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.
8. Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet

- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Yogyakarta, Total Media, 2011
- Lawrance M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1969.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT. Kanisius (Anggota IKAPI), 2007.
- Muchamad Ali Safa'at, *Tolak Ukur, Indikator, dan Parameter Kesalahan Perda*, sebagaimana dikuti kembali oleh Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Total Media, Kalimantan Tengah, 2011.
- Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke-15*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.

<https://ekon.go.id/info-sektoral/15/311/berita-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

LAMPIRAN I**FORMAT PENILAIAN KATEGORISASI REKOMENDASI PERATURAN
DAERAH**

Rentang Nilai	Temuan	Kategori Rekomendasi
0-9	Tidak ada temuan	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
10-25	Temuan sedikit	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
26-50	Temuan banyak	Mendesak , perlu masuk daftar propemperda.
51-100	Temuan banyak dan dampak besar	Sangat mendesak , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

**FORMAT PENILAIAN KATEGORISASI REKOMENDASI PERATURAN
WALIKOTA**

Rentang Nilai	Temuan	Kategori Rekomendasi
0-19	Tidak ada temuan	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
20-39	Temuan sedikit	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
40-59	Temuan banyak	Mendesak , perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.
60-100	Temuan banyak dan dampak besar	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA PER KATEGORI REKOMENDASI

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak.

Mendesak

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Tidak Mendesak

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Tidak Ada yang Perlu ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota.
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
 6. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
 7. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
 8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
 9. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
 10. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
 11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
 12. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
 13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.

14. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
16. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan.
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta.
18. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
19. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
21. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen Pada Kawasan Ketandan Yogyakarta.

22. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
23. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
24. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
25. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
26. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
27. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
28. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
29. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
30. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

31. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.
32. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
33. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
34. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
35. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.
36. Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Delegasi Peraturan Walikota oleh Peraturan Daerah

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
3. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
7. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
8. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
9. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
11. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.
12. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
13. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
14. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hingga saat ini belum dibentuk.
15. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
16. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
17. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
18. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
20. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
21. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
22. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
23. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.
24. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota
25. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.
26. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
27. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong
4. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun

2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021.

5. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
6. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
7. Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Tidak Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan.
3. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun.
5. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip di Kota Yogyakarta.
6. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kearsipan Di Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah.
9. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.

10. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
11. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
12. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
13. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.
14. Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM.

Tidak ada yang perlu ditinjaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
3. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.
5. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

6. Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
7. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.
8. Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN III

TABEL PENILAIAN INDIKATOR

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA PER PERANGKAT DAERAH

A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Bangunan.						
2.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak

	2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak						dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
5.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
6.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
4.	Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera

	beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					ditindaklanjuti.
5.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Perkotaan.					
6.	Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
7.	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.					
8.	Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
9.	Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
10.	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
11.	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain Dan Pemakaian	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan

	Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.					untuk segera ditindaklanjuti.
12.	Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

B. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan)	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak

2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan)						besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan).	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak

<p>tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah. (Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan)</p>					<p>besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

C. DINAS KESEHATAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		

1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Ada	Ada	Ada	-	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	-	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular	-	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian	Nilai	Rekomendasi
----	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------	-------------

				dengan Perda		
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
4.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat

	Pemberantasan Penyakit Menular						Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	-	Ada	Ada	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ada	Ada	Ada	-	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

3.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Ada	Ada	Ada	-	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
----	-----------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera

						ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
5.	Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
6.	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan

						untuk segera ditindaklanjuti.
7.	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

E. DINAS PERHUBUNGAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat

	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	Ada	-	-	10	Temuan sedikit .Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
5.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran	-	-	-	-	-	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian	Nilai	Rekomendasi
----	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------	-------------

				dengan Perda		
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak

	Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir					besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
5.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
6.	Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

F. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 16	-	-	-	-	-	tidak ada temuan, tidak

	Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta						ada yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja	-	-	-	-	-	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha	-	-	-	-	-	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.	-	Ada	-	20	Temuan sedikit. Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi

						catatan, jika ada perubahan.
2.	Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.	-	Ada	-	20	Temuan sedikit. Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan
3.	Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM	-	Ada	-	20	Temuan sedikit. Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
4.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor `16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
5.	Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan	-	Ada	-	-	Temuan sedikit. Tidak

	Usaha Milik Daerah.					Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
6.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
7.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

G. DINAS PERDAGANGAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
----	-------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-------	-------------

		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Ada	-	Ada	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir).	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun	Ada	-	25	-	50	Temuan banyak.

	2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang						Mendesak, perlu masuk daftar propemperda.
5.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran	-	-	-	-	-	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan

	Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.					untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
4.	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.					
5.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

H. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun	-	-	-	-	0	tidak ada

2019	tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas						temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti
------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak

2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas						besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

I. DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pemadam Kebakaran)	-	Ada	Ada	Ada	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan	Ada	Ada	Ada	-	60	tidak ada temuan, sangat mendesak.

Penanggulangan Kebakaran						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

2.	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta.	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	-	-	-	-	0	tidak ada temuan, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

No	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Ada	Ada	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

K. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan Daerah

No	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		

1.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	-	-	-	-	0	Tidak Ada yang Perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun	-	-	-	-	0	Tidak Ada yang Perlu ditindaklanjuti

4.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan	-	Ada	-	-	10	Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
5.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame	Ada	Ada	Ada	-	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
6.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

7.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
8.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
9.	Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik	Ada	Ada	Ada	-	75	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		

1.	Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021	-	-	Ada	40	Mendesak, perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Ada	-	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.

	2016 Tentang Rumah Susun					
4.	Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
5.	Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan.	-	Ada	-		Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
6.	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak, Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
7.	Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 Tentang	Ada	Ada	-	60	Sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta					
8.	Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan	-	-	Ada	25	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
9.	Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame	Ada	Ada	Ada	100	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
10.	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan	-	Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Bangunan Konstruksi Reklame					
11.	Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen Pada Kawasan Ketandan Yogyakarta	-	Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
12.	Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung	-	Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
13.	Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung		Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

14.	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung		Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
15.	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		Ada	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
16.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian	Ada	-	Ada	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Infrastruktur Pasif Telekomunikasi					
17.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota	40	-	20	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
18.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik	40	-	20	60	Sangat mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

L. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Ruang Wilayah						
---------------	--	--	--	--	--	--

Peraturan Walikota

Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
	40	20	40		
Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

M. DINAS PARIWISATA

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

	tentang Penyelenggaraan Kepariwisata						
2.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025	-	-	-		0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Ada	-	-	40	Mendesak, perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.

2.	Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata	Ada	-	-	40	Mendesak, perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.
3.	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Ada	-	-	40	Mendesak, perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.

N. BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.	Ada	-	Ada	Ada	90	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak,

						diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	-	Ada	Ada	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	Ada	Ada	Ada	100	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

O. BAGIAN ORGANISASI

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istimah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ada	Ada	Ada	-	60	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	-	-	-	-	0	Tidak Ada yang Perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah	-	-	-	-	0	Tidak Ada yang

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta						Perlu ditindaklanjuti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah	-	-	Ada	40	Mendesak , perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.

	Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

	Yogyakarta					
--	------------	--	--	--	--	--

P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

	Kependudukan						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti

Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.

2.	Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip di Kota Yogyakarta.	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
3.	Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kearsipan Di Pemerintah Kota Yogyakarta.	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
4.	Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta.	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.
5.	Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan	-	Ada	-	20	Tidak Mendesak , Masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika ada perubahan.

	Sistem Kearsipan Daerah.					
6.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Ada	Ada	Ada	100	Sangat mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

R. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Ada	-	Ada	-	50	Mendesak, perlu masuk daftar propemperda.
2.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	-	-	-	-	-	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hingga saat ini belum dibentuk	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti

S. BAGIAN HUKUM

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti

Peraturan Walikota

Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
	40	20	40		
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

T. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

	Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat					
2.	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	-	-	Ada	40	Mendesak, perlu masuk daftar perwal yang harus disusun.

U. DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

	Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.						
2.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.	-	-	-	-		Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
	40	20	40		
Delegasi Peraturan	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan

Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022					dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

W. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Peraturan Daerah

No.	Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
		25	10	25	40		
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Ketahanan Keluarga						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Peraturan Walikota

No.	Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
		40	20	40		
1.	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.
2.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
3.	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan

						untuk segera ditindaklanjuti.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

X. SEKRETARIAT DPRD

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	0	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
	40	20	40		
Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						segera ditindaklanjuti.
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

Y. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH

Peraturan Daerah

Nama Produk Hukum	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/ Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi
	25	10	25	40		
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ada	-	Ada	-	65	Sangat mendesak, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

Peraturan Walikota

Nama Produk Hukum	Delegasi Perwal	Intergasi Perwal	Perlu Penyesuaian dengan Perda	Nilai	Rekomendasi
	40	20	40		
Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ada	-	Ada	80	Temuan banyak dan dampak besar, Sangat Mendesak , diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

LAMPIRAN IV

HASIL INVENTARISASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KOTA YOGYAKARTA DARI TAHUN 2010-2021

Dari hasil inventarisasi dan evaluasi produk hukum Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2021 yang terdampak:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi.

Maka, produk hukum daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2021 hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kategori rekomendasi:

1. Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

Artinya adalah dalam produk hukum daerah Kota Yogyakarta tersebut tidak ada temuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya, sehingga produk hukum daerah tersebut masih sesuai dan dapat dilaksanakan.

2. Tidak Mendesak

Artinya adalah dalam produk hukum daerah Kota Yogyakarta tersebut ada sedikit temuan yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undang di atasnya namun hal tersebut masih bisa dipertahankan. Meskipun demikian temuan tersebut tetap menjadi catatan jika kemudian hari terjadi perubahan maka produk hukum daerah tersebut harus segera disesuaikan.

3. Mendesak

Artinya adalah dalam produk hukum daerah Kota Yogyakarta tersebut terdapat banyak temuan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undang di atasnya, sehingga perlu tindak lanjut untuk memasukan ke dalam daftar Propemperda.

4. Sangat Mendesak

Artinya adalah dalam produk hukum daerah Kota Yogyakarta tersebut terdapat banyak temuan yang memberikan dampak besar

terhadap pelaksanaan pemerintahan sehingga perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti.

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
3. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

5. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah.
6. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pihak Lain Dan Pemakaian Barang Milik Daerah Oleh Masyarakat.
8. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penghitungan Sewa Barang Milik Daerah.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan)
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan)

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan).

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah. (Retribusi Mobil Angkut Daging dan Angkut Ikan)

C. DINAS KESEHATAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan)
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. DINAS LINGKUNGAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)
2. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)
3. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan.
5. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3.
6. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
7. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. DINAS PERHUBUNGAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Tidak Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
5. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir,

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

F. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor `16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor `16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Jogja
3. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha

Tidak Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.
3. Peraturan Walikota Nomor 349 tahun 2020 Tentang Pembentukan Pembinaan Perumda PDAM.
4. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.

G. DINAS PERDAGANGAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi pemanfaatan lahan pasar, tempat bongkar muat pasar; tempat penyimpanan barang pasar; kios, los, dan lapak pendukung tempat khusus parkir).
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

3. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
5. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

H. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

I. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Mobil Tangga Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pemadam Kebakaran)
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

3. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta.

J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

K. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti.

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame.
5. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
6. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reklame di Bangunan Permanen Pada Kawasan Ketandan Yogyakarta.

7. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
9. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.
10. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi.
11. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota.
12. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Domestik

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021.

Tidak Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun.
2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan.
4. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan.

5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.

L. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Walikota

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.

M. DINAS PARIWISATA

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti.

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

Peraturan Walikota

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.
3. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

N. Badan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

O. Bagian Organisasi

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Tidak Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip di Kota Yogyakarta.
3. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kearsipan Di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah.

R. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Peraturan Daerah

Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

S. BAGIAN HUKUM

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Walikota

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

T. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Walikota

Mendesak

1. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

U. DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infratraktur Pasif Telekomunikasi.
2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

W. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

2. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.

X. SEKRETARIAT DPRD

Peraturan Daerah

Tidak ada yang Perlu Ditindaklanjuti

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Walikota

Sangat Mendesak

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Y. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Peraturan Daerah

Sangat Mendesak

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Walikota**Sangat Mendesak**

1. Delegasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah